

FENOMENA *CANCEL CULTURE* DI PLATFROM INSTAGRAM : ANALISIS PEMBUNGKAMAN SIMBOLIK TERHADAP GUS MIFTAH

Siti Nabila Ria, Eceh Trisna Ayuh

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

sitinabilaria03@gmail.com, ecehtrisna@umb.ac.id,

Abstract

Article History

Received : 20-07-2025

Revised : 30-07-2025

Accepted : 09-07-2025

Keywords:

Cancel Culture; Digital
Space; Public Opinion

This research aims to understand how cancel culture functions as a mechanism for symbolic silencing of public figures in the digital space, focusing on the Gus Miftah case in the dynamics of public opinion on Indonesian social media. Elisabeth Noelle-Neumann's Spiral of Silence theory is used to explain the tendency of individuals to choose silence when their opinions conflict with the majority opinion, as well as how the dominance of certain opinions creates a repressive social climate against diversity of views. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation of social media content, especially Instagram, literature studies, and digital documentation of public narratives that developed during the viral period of the Gus Miftah case. The results showed that cancel culture against Gus Miftah was not only a spontaneous criticism, but also an organized process that formed collective social pressure. When negative opinions dominate, supporters or parties with different views tend to remain silent, showing the spiral of silence mechanism in action. As a result, symbolic silencing occurs, where public figures lose legitimacy without space for open dialogue. This research emphasizes the importance of maintaining diversity of opinion in the digital space so that freedom of expression is preserved.

Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi publik secara radikal. Ruang-ruang diskusi yang sebelumnya terpusat dan dikontrol institusi kini bergeser ke ranah digital yang lebih cair, terbuka, dan bersifat partisipatif. Media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan individu tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkan opini secara luas. Kemampuan ini menjadikan media sosial sebagai arena demokratis baru, di mana publik memiliki kekuatan untuk memengaruhi wacana, membentuk persepsi, dan bahkan menentukan legitimasi seorang tokoh publik. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan baru. Arus informasi yang tak terbandung, intensitas interaksi, dan algoritma yang memperkuat polarisasi menjadikan ruang digital rentan terhadap dinamika opini

publik yang ekstrem dan tidak seimbang. Dalam banyak kasus, tokoh publik menjadi sasaran kritik kolektif yang terorganisasi dan bersifat masif, sering kali tanpa ruang untuk klarifikasi atau dialog yang adil. Fenomena ini dikenal sebagai *cancel culture* (Su 2024).

Cancel culture atau budaya pembatalan adalah fenomena sosial di mana individu atau kelompok secara kolektif menarik dukungan terhadap seseorang, biasanya tokoh publik, karena dianggap telah melakukan kesalahan moral, sosial, atau politik. Pembatalan ini biasanya dilakukan dengan cara menyebarluaskan kritik, ajakan boikot, atau upaya menghilangkan pengaruh tokoh tersebut dari ruang publik, terutama di media sosial (Asrori 2024). Di Indonesia, fenomena ini semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran sosial masyarakat terhadap isu-isu keadilan, politik identitas, keberagaman, dan integritas publik. Masyarakat digital Indonesia menjadi lebih aktif dalam mengawasi, mengomentari, bahkan menghakimi perilaku tokoh-tokoh publik, mulai dari selebritas, politisi, hingga tokoh agama. Dalam konteks ini, cancel culture sering diposisikan sebagai bentuk kontrol sosial horizontal yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan simbolik. Namun, pembatalan ini juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, cancel culture dapat berfungsi sebagai koreksi sosial terhadap penyalahgunaan otoritas. Di sisi lain, ia juga berpotensi menjadi instrumen pembungkaman, eksklusi, dan penghakiman massa yang tidak selalu proporsional. Ketika opini mayoritas mendominasi tanpa kontrol atau pertimbangan kritis, individu atau kelompok yang berbeda pandangan menjadi takut untuk bersuara. Inilah yang disebut sebagai pembungkaman simbolik, di mana suara alternatif ditekan bukan melalui kekuasaan institusional, tetapi melalui kekuatan sosial kolektif yang dominan (Yarchi, Baden, and Kligler-Vilenchik 2020).

Sebagai negara dengan penetrasi internet dan media sosial yang tinggi, Indonesia telah menjadi saksi berbagai gelombang cancel culture yang menimpa berbagai figure publik. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika komunikasi digital, tetapi juga mengungkap kompleksitas nilai-nilai sosial, norma budaya, dan mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Cancel culture dalam konteks Indonesia memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan manifestasinya di negara-negara Barat. Faktor-faktor seperti nilai-nilai religius, norma kesopanan tradisional, hierarki sosial, dan sensitivitas terhadap isu-isu identitas menjadi parameter yang menentukan apakah seseorang akan menjadi target cancel culture. Praktik ini seringkali dimulai dari media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan Facebook, kemudian menyebar ke platform digital lainnya dan bahkan media mainstream (Laili, Suharto, and Sukidin 2024).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menunjukkan kompleksitas fenomena cancel culture di Indonesia adalah kasus yang menimpa Gus Miftah, seorang pendakwah yang dikenal luas di media sosial, merupakan figur yang menarik dalam konteks ini. Ia merepresentasikan wajah Islam yang inklusif, toleran, dan dekat dengan kalangan nontradisional, termasuk artis dan publik figur. Gaya dakwahnya yang santai, menggunakan bahasa populer, serta kedekatannya dengan dunia hiburan dan politik menjadikannya sosok yang kontroversial bagi sebagian kalangan. Kontroversi atas Gus Miftah tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia muncul dalam konteks sosial-politik yang penuh dengan

polarisasi identitas dan tarik-menarik otoritas keagamaan. Beberapa pernyataan dan tindakannya di ruang publik seperti pernyataannya dalam sebuah acara publik yang dianggap menyindir atau mengolok-olok seorang tokoh yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik karena menjual es teh. Dalam pernyataannya, Gus Miftah mengatakan “ya sana jual gobl*k” dengan nada jenaka namun disertai konotasi merendahkan, memicu perdebatan keras di media sosial. Sebagian publik menganggap pendekatan Gus Miftah sebagai dakwah yang kontekstual dan merangkul. Namun, tidak sedikit pula yang menilai tindakannya menyimpang dari norma-norma keagamaan dan cenderung mencemari simbol-simbol Islam. Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi upaya sistematis untuk membatalkan Gus Miftah dari ruang publik. Seruan boikot, hujatan massal, pelabelan negatif, hingga penyebaran narasi delegitimasi menjadi bagian dari cancel culture yang dialaminya. Di sinilah letak relevansi penelitian ini: memahami bagaimana cancel culture terhadap Gus Miftah bekerja bukan sekadar sebagai ekspresi kritik, tetapi sebagai bentuk pembungkaman simbolik terhadap representasi keberagaman dalam Islam.

Cancel culture pada dasarnya bukan fenomena baru. Dalam sejarah sosial politik, masyarakat selalu memiliki cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tokoh atau institusi mulai dari boikot, demonstrasi, hingga penarikan legitimasi moral. Namun, media sosial mempercepat dan memperluas skala dampaknya. Di era digital, pembatalan tidak membutuhkan struktur formal, cukup dengan satu unggahan viral, seorang tokoh bisa kehilangan dukungan publik secara instan (Santosa 2023). Yang menjadi persoalan adalah ketika cancel culture berubah fungsi dari alat kritik menjadi mekanisme pembungkaman simbolik. Dalam konteks ini, pembatalan bukan lagi untuk mendorong perubahan atau refleksi, tetapi untuk mendiamkan dan menghapus eksistensi tokoh tertentu dari ruang diskursif. Tokoh yang dibatalkan kehilangan ruang bicara, diputus akses komunikasinya, dan distigma sebagai ancaman bagi nilai mayoritas. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dilakukan terhadap tokoh agama, yang secara sosial memiliki beban simbolik yang tinggi. Pembungkaman simbolik ini berbahaya karena menyiratkan bahwa hanya suara-suara tertentu yang berhak eksis di ruang publik. Opini minoritas, pandangan alternatif, atau gaya dakwah yang berbeda bisa dipersekusi secara digital jika tidak sesuai dengan arus dominan. Dalam jangka panjang, hal ini mereduksi kualitas demokrasi dan mempersempit ruang kebebasan berekspresi (Juniman 2023). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dominasi opini mayoritas di ruang digital dapat menciptakan tekanan sosial terhadap suara minoritas. Hal ini sejalan dengan temuan Juniman (2023), Asrori (2024), dan Laili dkk. (2024) yang mengungkap bagaimana cancel culture dapat memunculkan iklim pembungkaman. Penelitian ini berupaya melanjutkan dan memperdalam temuan tersebut dengan melihatnya melalui perspektif Spiral of Silence dalam kasus Gus Miftah.

Untuk memahami dinamika pembungkaman dalam cancel culture, teori *Spiral of Silence* dari Elisabeth Noelle-Neumann menjadi kerangka yang relevan. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung bungkam ketika merasa pendapatnya berbeda dengan opini mayoritas karena takut dikucilkan. Ketika mayoritas bersuara lantang dan mendapatkan dukungan besar, individu dengan pandangan minoritas cenderung menarik diri, membiarkan opini mayoritas mendominasi. Dalam konteks media sosial, spiral of silence dapat bekerja lebih

kuat karena sifat platform digital yang memperkuat popularitas, viralitas, dan dukungan mayoritas. Netizen yang memiliki pandangan berbeda dari arus utama cenderung memilih diam karena khawatir akan serangan, perundungan, atau pelabelan negatif. Akibatnya, ruang publik digital menjadi homogen dan tidak inklusif terhadap suara-suara yang berbeda (Yusfriadi 2020). Fenomena ini sangat terlihat dalam kasus Gus Miftah. Ketika gelombang kritik dan pembatalan terhadapnya meningkat, hanya sedikit tokoh yang berani menyuarakan dukungan secara terbuka. Banyak pihak yang mendukung pendekatan dakwah Gus Miftah lebih memilih diam karena khawatir akan mendapat backlash dari kelompok mayoritas. Inilah spiral of silence yang beroperasi dalam cancel culture penguatan opini dominan yang diikuti oleh pembungkaman simbolik terhadap opini berbeda.

Instagram menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh dalam membentuk opini publik di Indonesia. Berdasarkan laporan We Are Social (2024), Instagram menempati peringkat kedua sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dengan pengguna aktif mencapai lebih dari 100 juta orang. Ciri khas visual dan interaktifitas tinggi menjadikan Instagram sebagai medium yang efektif dalam penyebaran isu sosial dan moral. Dalam konteks *cancel culture*, Instagram sering kali menjadi arena utama untuk mengorganisir narasi pembatalan melalui unggahan, komentar, dan kampanye *hashtag* (Essential et al. 2024). Berbeda dengan platform lain seperti TikTok atau YouTube, Instagram menawarkan ruang yang relatif lebih diskursif dalam bentuk posting, stories, dan comment section yang memfasilitasi interaksi antara pengguna. Di sinilah terbentuk dinamika antara opini dominan dan opini minoritas, sebagaimana dijelaskan oleh teori Spiral of Silence. Pengguna yang memiliki pandangan berbeda sering kali memilih diam untuk menghindari penolakan sosial, sehingga terjadi pembentukan opini mayoritas yang semakin kuat di ruang digital.

Penelitian ini menjadi penting karena cancel culture bukan hanya persoalan media sosial, tetapi juga persoalan demokrasi, representasi, dan kebebasan berekspresi. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan pandangan, gaya, dan pendekatan dalam mengekspresikan nilai termasuk nilai keagamaan harus dipahami sebagai kekayaan, bukan ancaman. Gus Miftah adalah contoh konkret dari bagaimana tokoh publik dapat mengalami delegitimasi bukan karena kesalahan hukum, tetapi karena tidak sesuai dengan norma dominan yang dikonstruksi oleh opini publik digital. Dalam banyak kasus, pembatalan seperti ini tidak memberikan ruang klarifikasi, rekonsiliasi, atau pertimbangan objektif. Ia bekerja secara cepat, emosional, dan sering kali irasional (Purnamasari 2022). Penelitian ini juga relevan secara akademik karena mengkaji cancel culture dari perspektif yang belum banyak dibahas di Indonesia, yakni sebagai mekanisme pembungkaman simbolik melalui teori spiral of silence. Sebagian besar kajian cancel culture masih berkutat pada sisi etika atau politik identitas, tanpa membedah bagaimana pembungkaman terjadi secara sosial dan psikologis dalam ekosistem digital.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika opini publik digital di Indonesia. Studi ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan, pelaku media, tokoh publik, dan masyarakat umum dalam membangun ruang digital yang lebih adil, terbuka, dan demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana bentuk-bentuk pembungkaman simbolik muncul melalui praktik *cancel culture* di media sosial, khususnya Instagram. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi konten media sosial, untuk mengamati langsung interaksi, komentar, dan narasi yang berkembang terhadap Gus Miftah. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu antara bulan Januari hingga Mei 2025. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada periode viralnya kasus *cancel culture* terhadap Gus Miftah di media sosial, khususnya Instagram. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi terhadap unggahan, komentar, serta narasi digital yang berkembang di berbagai akun publik dan media daring yang menyoroti Gus Miftah.

Dalam penelitian ini, informan dibangun berdasarkan kelompok-kelompok publik yang paling dominan berinteraksi selama berlangsungnya kasus *cancel culture* terhadap Gus Miftah di Instagram. Kelompok pertama yang menjadi sorotan adalah para pengguna yang paling vokal menyuarakan pembatalan. Mereka adalah pemilik komentar-komentar bernada keras, sarkastik, hingga merendahkan, yang secara konsisten mendominasi kolom komentar pada unggahan viral. Gaya bahasa mereka cenderung emosional, langsung menyerang identitas dan simbol keagamaan Gus Miftah, serta mendorong ajakan boikot baik secara eksplisit maupun implisit. Kelompok inilah yang membentuk opini mayoritas, sehingga menjadi motor utama gelombang *cancel culture*. Di sisi lain, terdapat kelompok pendukung diam sebuah kelompok yang sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan pembatalan, namun memilih bungkam karena khawatir menjadi sasaran serangan berikutnya. Karakteristik mereka terlihat dari pola interaksinya, jarang atau bahkan tidak pernah memberikan komentar, tetapi tetap hadir dalam bentuk aktivitas pasif seperti melihat unggahan, menyukai konten tertentu, atau menyimpan postingan terkait. Kelompok ini merepresentasikan mekanisme *spiral of silence* yang sangat kuat. Mereka memiliki pandangan berbeda, tetapi takut berbicara karena dominasi komentar negatif membuat mereka merasa terisolasi jika bersuara.

Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan agar peneliti memperoleh dinamika yang aktual terkait perubahan opini publik, respon netizen, serta perkembangan wacana yang muncul dari waktu ke waktu. Lokasi penelitian berfokus pada ruang digital, dengan platform utama adalah Instagram. Pemilihan Instagram didasarkan pada karakteristiknya sebagai media berbasis visual dan interaksi publik yang tinggi, di mana pengguna dapat mengekspresikan opini secara langsung melalui kolom komentar, fitur like, unggahan ulang, hingga pembuatan konten reaksi. Platform ini memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap tokoh-tokoh tertentu, termasuk Gus Miftah.

Untuk menjamin keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu proses pengujian keabsahan data dengan Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa kebenaran data melalui berbagai sumber informasi yang relevan dan saling melengkapi. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari berbagai bentuk materi digital yang berhubungan dengan fenomena *cancel culture* terhadap Gus Miftah di Instagram, seperti unggahan, komentar, artikel berita daring, serta tanggapan publik di media sosial, selanjutnya Triangulasi metode

dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan dan analisis data untuk menguji konsistensi hasil temuan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggabungkan analisis wacana digital dengan studi literatur dan dokumentasi media daring, dan yang terakhir Triangulasi teori digunakan untuk menafsirkan data dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis agar hasil analisis tidak terjebak pada satu pandangan tunggal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Spiral of Silence* dari Elisabeth Noelle-Neumann untuk memahami dinamika diam dan dominasi opini mayoritas dalam ruang digital.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teori Spiral of Silence sebagai alat analisis utama. Teori ini digunakan untuk membaca bagaimana opini mayoritas di ruang digital, khususnya Instagram, membentuk tekanan sosial yang membuat individu atau kelompok dengan pandangan berbeda memilih diam. Melalui kerangka Spiral of Silence, penelitian menafsirkan dinamika dominasi opini publik, mekanisme tekanan sosial, serta proses pembungkaman simbolik yang muncul ketika suara alternatif kehilangan keberanian untuk tampil di ruang publik. Dengan menggunakan alat analisis ini, penelitian mampu memahami secara mendalam bagaimana cancel culture bekerja bukan hanya sebagai ekspresi kritik publik, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengarahkan tokoh tertentu mengalami delegitimasi dan pembungkaman dalam konteks opini publik digital.

Pembahasan

Cancel culture atau budaya pembatalan adalah fenomena sosial di mana individu atau kelompok secara kolektif menarik dukungan terhadap seseorang, biasanya tokoh publik, karena dianggap telah melakukan kesalahan moral, sosial, atau politik. Pembatalan ini biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kritik, ajakan boikot, atau upaya menghilangkan pengaruh tokoh tersebut dari ruang publik, terutama di media sosial. Fenomena cancel culture terhadap Gus Miftah di ruang digital, khususnya Instagram, menjadi sorotan penting dalam memahami bagaimana opini publik terbentuk, tersebar, dan berdampak pada legitimasi seorang tokoh. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berperan sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ruang reproduksi wacana sosial yang sangat dinamis, penuh tekanan sosial, dan sarat kepentingan simbolik (Altamira and Movementi 2022).

Gus Miftah, sebagai seorang dai yang aktif dalam berbagai kegiatan dakwah lintas segmen sosial, menjadi sasaran kontroversi ketika narasi yang dibangun terhadapnya dipicu oleh beberapa pernyataan publik dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan oleh sebagian masyarakat digital. Penelitian ini menemukan bahwa proses cancel culture yang menimpa Gus Miftah tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui intensitas opini publik yang terakumulasi dalam komentar, unggahan, dan cuitan yang menyebar secara masif dan terstruktur. Opini-opini negatif yang berulang di media sosial menciptakan tekanan sosial yang sistemik, menyebabkan banyak pengguna yang memiliki pandangan berbeda memilih untuk diam. Diamnya kelompok ini menunjukkan bahwa spiral of silence bekerja secara aktif di mana opini dominan bukan semata-mata karena substansi, tetapi karena dorongan keterpaksaan sosial dan ancaman isolasi.

**Gambar 1.1 Instagram worldcore.id
(Sumber: Instagram @worldcore.id, 2024)**



Dari Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa unggahan Instagram yang menampilkan Gus Miftah sedang berbicara dalam sebuah forum ceramah mencerminkan sebuah fenomena awal dari praktik cancel culture yang diarahkan kepadanya. Dalam potongan video tersebut, Gus Miftah terlihat mengenakan busana mencolok, kacamata hitam, dan mengatakan "Ya sana jual!" dengan nada tegas. Potongan video ini diunggah oleh akun worldcore.id dengan menambahkan caption bernada sinis seperti "Katanya liat fullnya" dan "Malah lebih parah", yang menyiratkan bahwa bahkan setelah menonton versi lengkapnya, citra Gus Miftah dianggap tetap buruk di mata publik. Unggahan semacam ini menjadi contoh awal bagaimana cancel culture bekerja melalui pembentukan persepsi negatif terhadap seorang tokoh publik.

Fenomena cancel culture dalam kasus ini tidak langsung muncul dalam bentuk seruan pemboikotan, melainkan melalui mekanisme halus berupa pembungkaman simbolik dan permainan narasi di ruang digital. Pemotongan video tanpa menyertakan konteks lengkap membuat pernyataan Gus Miftah tampak lebih kasar atau tidak pantas. Hal ini menjadi pemicu bagi audiens untuk membentuk opini berdasarkan kesan sepintas yang mereka tangkap dari video tersebut. Caption yang menyertai unggahan tersebut memperkuat framing tersebut, dan mendorong publik untuk memaknai Gus Miftah sebagai sosok yang tidak sesuai dengan ekspektasi seorang pendakwah.

Respon emosional netizen terhadap unggahan ini juga mempercepat terbentuknya atmosfer pembatalan simbolik. Komentar-komentar yang muncul sering kali tidak lagi fokus pada isi ceramah atau argumentasi Gus Miftah secara menyeluruh, melainkan pada ekspresi, gaya bicara, hingga penampilannya. Reaksi semacam ini merupakan cerminan dari apa yang disebut sebagai pembungkaman simbolik, di mana individu tidak diserang secara langsung dengan argumen rasional, tetapi dijatuhkan melalui simbol-simbol yang dimanipulasi untuk mempermalukan, merendahkan, atau mendeligitimasi posisinya. Dengan kata lain, Gus Miftah tidak sedang diajak berdialog atau dikritisi secara ilmiah, melainkan

secara simbolik "dikeluarkan" dari ruang legitimasi publik hanya karena penampilan dan potongan ucapannya yang viral.

Fenomena ini juga menggambarkan bagaimana ruang digital dapat menjadi arena pembentukan opini yang sangat kuat, bahkan tanpa perlu menunggu proses klarifikasi. Potongan video seperti ini menjadi bahan bakar utama dalam mekanisme cancel culture, terutama ketika disebarluaskan secara luas oleh akun-akun besar yang memiliki banyak pengikut. Pada tahap awal, Gus Miftah belum secara eksplisit "dibatalkan", namun citranya mulai dipelintir dan dibentuk sedemikian rupa agar publik merasa bahwa ia tidak layak untuk terus dijadikan rujukan. Jika narasi ini terus diperkuat dan diperbincangkan secara negatif, maka proses cancel culture bisa berlanjut ke tahap pembatalan sosial secara eksplisit.

Gambar 1.2 Cuitan Komentar Cancel Culture



Dari Gambar 1.2 yang ditampilkan merupakan potret konkret dari bagaimana *cancel culture* terhadap Gus Miftah bekerja di ruang digital, khususnya media sosial seperti Instagram. Kumpulan komentar dalam gambar tersebut menunjukkan reaksi publik yang sebagian besar bernada negatif, sarkastik, hingga menyerang secara personal. Komentar-komentar ini tidak hanya mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap sikap atau pernyataan Gus Miftah, melainkan sudah berkembang menjadi upaya untuk menghapus legitimasi dan kehadirannya sebagai tokoh publik. Dalam konteks ini, kritik yang semula mungkin berangkat dari perbedaan pandangan, berubah menjadi serangan masif yang menutup ruang klarifikasi, mengabaikan itikad baik, dan menuntut agar tokoh tersebut dipinggirkan dari ruang sosial. Salah satu hal yang terlihat jelas dalam gambar adalah adanya komentar yang langsung merendahkan posisi Gus Miftah, baik secara simbolik maupun personal. Beberapa komentar menyebutnya sebagai “penjual agama,” “ulama settingan,” hingga menyarankan agar ia berhenti berdakwah dan beralih profesi menjadi penjual es. Ini bukan hanya bentuk kritik terhadap isi ceramah atau tindakannya, tetapi lebih jauh merupakan pelecehan terhadap identitas simbolik yang selama ini melekat pada dirinya sebagai seorang dai atau tokoh agama. Ungkapan-ungkapan seperti ini merupakan bentuk delegitimasi yang dialami Gus Miftah.

Gambar 1.3 Instagram detikcom Gambar 1.4 Cuitan Komentar

Netizen (Sumber: Instagram @detikcom, 2024) Terhadap Klarifikasi Gus Miftah



Dari gambar 1.3 dan 1.4 terdapat postingan dan komentar yang memperlihatkan adanya kecurigaan terhadap permintaan maaf yang disampaikan oleh Gus Miftah. Beberapa pengguna menyebut bahwa permintaan maafnya bukan karena merasa bersalah, tetapi karena ditegur oleh pihak berkuasa atau hanya karena ingin menjaga citra. Narasi semacam ini memperlihatkan bahwa ruang digital semakin jauh dari sikap adil dalam menilai niat dan itikad seseorang. Bahkan ketika seseorang menunjukkan upaya klarifikasi atau permohonan maaf, publik digital justru menolaknya mentah-mentah dengan prasangka buruk. Fenomena ini menunjukkan bahwa cancel culture telah membentuk iklim sosial yang menutup kemungkinan rekonsiliasi atau pemulihan reputasi. Di sisi lain, komentar-komentar dalam gambar juga menunjukkan adanya tekanan kolektif yang mengarah pada upaya sistematis untuk menyingkirkan Gus Miftah dari ruang publik. Komentar yang menyuarakan “boikot semua pengajiannya,” “jangan undang dia lagi,” hingga ajakan untuk “report akunnya,” mengindikasikan bahwa pengguna media sosial tidak hanya ingin menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga ingin mencabut akses beliau terhadap ruang publik. Ini adalah inti dari cancel culture bukan sekadar ekspresi kritik, tetapi upaya menghapus eksistensi sosial seseorang dari platform dan forum yang selama ini ia akses.

Fenomena spiral of silence juga tercermin dalam dinamika komentar tersebut. Dalam suasana di mana mayoritas komentar bersifat menyerang dan menghina, suara-suara yang mencoba memberikan pembelaan atau menunjukkan empati tidak terlihat menonjol, bahkan mungkin sengaja ditekan atau tidak berani muncul. Ketika ruang publik dikuasai oleh opini dominan yang agresif, individu dengan pendapat berbeda lebih memilih diam karena takut menjadi target berikutnya. Ini adalah bentuk nyata dari spiral of silence yang dijelaskan Elisabeth Noelle-Neumann, di mana seseorang lebih memilih bungkam daripada dikucilkan oleh mayoritas. Dari keseluruhan isi gambar, terlihat bahwa cancel culture tidak lagi sekadar menjadi sarana koreksi sosial terhadap tokoh publik yang dianggap melakukan kesalahan, tetapi telah berubah menjadi bentuk pembungkaman simbolik yang menghilangkan ruang dialog, klarifikasi, dan pemulihan. Gus Miftah menjadi representasi dari bagaimana figur publik dapat kehilangan

legitimasi hanya karena tekanan opini yang berkembang secara masif dan sepihak di media sosial. Kritik yang tidak diimbangi dengan etika komunikasi dan pemahaman konteks telah menjelma menjadi hukuman sosial yang menghancurkan, tanpa proses tabayyun atau klarifikasi.

Gambar ini memperkuat temuan bahwa media sosial tidak netral. Platform seperti Instagram memungkinkan opini-opini yang paling menarik emosi untuk muncul di bagian teratas, menciptakan ilusi bahwa itu adalah representasi suara mayoritas. Dalam kasus Gus Miftah, ini membuat narasi cancel menjadi dominan, sementara opini yang netral atau mendukung kehilangan visibilitas. Oleh karena itu, gambar ini tidak hanya relevan sebagai bukti visual dalam penelitian ini, tetapi juga menjadi refleksi penting atas betapa rentannya ruang digital terhadap manipulasi persepsi dan dominasi opini tunggal. Dengan demikian, gambar ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana cancel culture bekerja sebagai alat pembungkaman simbolik, serta memperlihatkan bagaimana spiral of silence menutup ruang dialog yang sehat. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan reaksi, tetapi juga kebijaksanaan kolektif untuk menjaga agar ruang digital tetap menjadi arena pertukaran gagasan, bukan ruang penghakiman massal.

Gambar 1.5 Cuitan Komentar Yang Memperlihatkan Pembungkaman Simbolik



Pada titik inilah mekanisme pembungkaman simbolik beroperasi. Gus Miftah tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan klarifikasinya, atau jika pun ada, tanggapannya tidak dianggap valid karena sudah terbentuk persepsi publik yang menutup kemungkinan dialog. Ini menunjukkan bahwa cancel culture bukan lagi soal benar atau salah, tetapi bagaimana dominasi opini membentuk realitas sosial yang memaksa. Dengan kata lain, ketika opini publik digital telah terbentuk secara kuat, bahkan klarifikasi sekalipun tidak cukup untuk membalikkan pandangan mayoritas. Ini menandai hilangnya ruang diskusi terbuka, yang semestinya menjadi fondasi dari kehidupan publik yang semestinya menjadi fondasi dari kehidupan publik yang sehat.

Dampak dari fenomena ini sangat nyata. Gus Miftah mengalami penghilangan legitimasi publik, meskipun tidak ada proses pembuktian formal bahwa ia melakukan kesalahan berat. Ia menjadi representasi bagaimana seorang tokoh publik bisa kehilangan kepercayaan masyarakat digital hanya karena dikonstruksi melalui opini yang dominan, tanpa kesempatan membela diri secara adil. Dalam hal ini, cancel culture bukan sekadar bentuk kritik sosial, tetapi telah berubahinstrumen pembungkaman terhadap keberagaman pandangan dan hak

berekspresi. Pembungkaman simbolik yang terjadi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap ekosistem komunikasi digital di Indonesia. Ketika tokoh-tokoh publik, termasuk ulama, tidak lagi bisa menyampaikan pandangannya secara terbuka karena takut dikritik secara brutal oleh warganet, maka ruang demokrasi pun semakin menyempit. Fenomena ini mengancam keberagaman perspektif yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa dalam menyikapi isu-isu sosial, agama, dan kebangsaan.

Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk membangun budaya digital yang inklusif dan etis. Media sosial harus menjadi ruang untuk dialog, bukan tempat penghakiman. Kritik harus tetap diberikan ruang, tetapi harus berdasarkan data, niat baik, dan semangat membangun, bukan dalam bentuk ujaran kebencian yang dibalut dalam bahasa moral. Selain itu, diperlukan peran aktif dari platform media sosial itu sendiri untuk menciptakan algoritma yang lebih adil, tidak hanya mengedepankan interaksi, tetapi juga keberagaman dan keseimbangan informasi.

Gambar 1.6 Legitimasi yang di alami Gus Miftah



Pada Gambar 1.6 menegaskan bahwa proses cancel culture tidak berhenti pada komentar digital semata, tetapi dapat menjelma menjadi aksi kolektif yang terorganisasi dan berdampak nyata terhadap posisi sosial maupun politik seorang tokoh. Petisi digital ini menunjukkan bagaimana tekanan publik yang awalnya lahir dari *viralitas komentar* dan narasi di media sosial, mampu dikristalkan menjadi gerakan yang lebih formal dan terstruktur yakni melalui penggalangan tanda tangan massal. Gambar ini memperkuat argumentasi bahwa Gus Miftah mengalami pembungkaman simbolik, karena posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden bukan dicabut melalui mekanisme formal negara atau evaluasi kinerja birokrasi, tetapi melalui tekanan opini publik digital yang massif. Ketika opini mayoritas sudah terbangun dan menguat melalui media sosial khususnya lewat unggahan, komentar, dan kampanye di Instagram maka posisi simbolik yang selama ini melekat padanya sebagai ulama, dai, dan tokoh nasional, perlahan

runtuh. Ia tidak hanya dikritik, tetapi “dicabut hak tampil”-nya secara sosial oleh masyarakat digital.

Petisi dalam gambar juga mencerminkan apa yang dalam kajian *cancel culture* disebut sebagai *ritual penghukuman publik* yang bersifat simbolik dan berskala besar. Gus Miftah bukan hanya kehilangan jabatan politik, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik dalam kapasitasnya sebagai figur agama. Ini adalah esensi dari pembungkaman simbolik, yakni pencabutan legitimasi dan kepercayaan sosial melalui tekanan simbolik dan wacana yang dikonstruksi oleh opini digital. Lebih jauh, keberhasilan petisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial sebagai ruang pembentuk opini dominan. Dalam penelitian ini, platform Instagram berperan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap Gus Miftah. Komentar-komentar negatif, unggahan viral, serta penyebaran narasi yang mempermasalahkan kedekatan Gus Miftah dengan lingkaran kekuasaan, telah membentuk gelombang tekanan sosial yang mengarah pada delegitimasi. Proses ini diperkuat dengan kampanye seperti tagar, meme, video singkat, dan akhirnya kanal formal seperti petisi di change.org.

Gambar ini juga menggambarkan sisi lain dari **spiral of silence** dalam teori Elisabeth Noelle-Neumann. Ketika tekanan digital telah mengkristal menjadi petisi, maka individu-individu yang ingin menyuarakan pandangan berbeda (misalnya membela atau memberi perspektif lain terhadap Gus Miftah), semakin merasa tidak aman untuk berbicara. Dengan kata lain, ruang publik menjadi monolitik hanya satu suara yang boleh terdengar yaitu suara yang menuntut pencopotan. Spiral of silence bekerja bukan hanya dalam kolom komentar, tetapi juga dalam aksi-aksi sosial digital yang masif dan meminggirkan pandangan alternatif. Gambar ini menjadi representasi visual dari dampak akhir *cancel culture* di era digital, tokoh publik tidak hanya menghadapi serangan reputasi, tetapi juga berisiko kehilangan jabatan dan legitimasi sosial akibat tekanan opini yang dibentuk secara kolektif dan viral. Dalam penelitian ini, gambar tersebut sangat relevan untuk memperkuat analisis bahwa pembungkaman simbolik terhadap Gus Miftah terjadi secara nyata melalui mekanisme *cancel culture* yang berawal dari media sosial, dan berakhir pada konsekuensi struktural di dunia nyata.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena *cancel culture* di platform Instagram berfungsi sebagai mekanisme pembungkaman simbolik yang nyata terhadap tokoh publik di ruang digital. *Cancel culture* tidak lagi sekadar menjadi ekspresi kritik spontan, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang terstruktur dan kolektif, dengan pola serangan yang tidak hanya menasar tindakan, tetapi juga identitas simbolik dari individu yang menjadi sasaran. Proses ini mencerminkan pergeseran fungsi media sosial dari ruang diskusi menjadi arena penghakiman massal yang didominasi oleh tekanan opini publik.

Komentar-komentar yang tersebar luas di media sosial menunjukkan pola yang beragam, serangan personal, pelecehan simbolik, sarkasme, hingga ajakan untuk memboikot dan menghapus peran sosial seseorang secara total. Narasi yang mendominasi tersebut memunculkan efek *spiral of silence*, di mana individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda cenderung diam karena takut

dikucilkan oleh mayoritas. Kondisi ini menciptakan atmosfer sosial yang tidak inklusif dan represif terhadap keberagaman pandangan, serta memperlihatkan betapa kuatnya kekuasaan opini digital dalam membentuk persepsi dan realitas sosial

Dengan demikian, cancel culture di ruang digital telah melampaui batas sebagai kontrol sosial, dan berubah menjadi bentuk dominasi wacana yang dapat membungkam seseorang secara permanen dari ruang publik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberagaman pandangan sangat rentan di tengah tekanan viralitas, dan bahwa media sosial masih belum menjadi ruang demokratis yang sepenuhnya aman dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang etika beropini di dunia digital, guna menjaga ruang publik yang sehat, terbuka terhadap perbedaan, dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Altamira, Melisa Bunga, and Satwika Gemala Movementi. 2022. "Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10(1): 37. doi:10.7454/jvi.v10i1.1177.
- Asrori, Khozinatul. 2024. "FENOMENA CANCEL CULTURE : DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN BERICARA DAN Khozinatul Asrori." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 10(2): 242–59.
- Essential, T H E, Guide To, T H E Latest, and Connected Behaviours. 2024. "DIGITAL 2024."
- Juniman, Puput Tripeni. 2023. "Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 18(1): 1–14. doi:10.37680/adabiya.v18i1.2451.
- Laili, Alfin Nur, Pudjo Suharso, and Sukidin Sukidin. 2024. "Navigating Cancel Culture in Indonesia: Understanding Cyberbullying and Social Control in Viral Cases (September-November 2023)." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 26(1): 59–67. doi:10.25077/jantro.v26.n1.p59-67.2024.
- Purnamasari, Novita Ika. 2022. "Cancel Culture: Dilema Ruang Publik Dan Kuasa Netizen." *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(2): 137–49. doi:10.35760/mkm.2022.v6i2.7719.
- Santosa, Dian Rahmani. 2023. "Digital Discourses Mengenai Fenomena Cancel Culture Saipul Jamil Dalam Media Sosial TikTok." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(12): 10272–76. doi:10.54371/jiip.v6i12.3411.
- Su, Yongkang. 2024. "Analysis on the Problems of Internet Conflicts and Countermeasures." *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 75(1): 115–21. doi:10.54254/2753-7048/2024.17839.
- Yarchi, Moran, Christian Baden, and Neta Kligler-Vilenchik. 2020. "Political Polarization on the Digital Sphere: A Cross-Platform, Over-Time Analysis of Interactional, Positional, and Affective Polarization on Social Media." *Political Communication* 00(00): 1–42. doi:10.1080/10584609.2020.1785067.
- Yusfriadi, S. 2020. "Teori Spiral Keheningan (Spiral of Silence Theory)." *Jurnal Al-Nasyr Edisi II volume II Januari-Desember II*: 174.